

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Firdausiyah (2011) mengenai Analisa Tingkat Permintaan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2006 – 2007. Penelitian adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif yang dilakukan pada 5 bank syariah di Indonesia. Dari analisa data yang telah dilakukan secara serentak menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita dan nisbah bagi hasil memiliki hasil yang lebih signifikan terhadap permintaan pembiayaan daripada variabel suku bunga kredit modal kerja.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Luluk Fitriah (2014) mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR dan CAR Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, nisbah bagi hasil, LAR dan CAR terhadap pembiayaan musyarakah, penelitian ini mengambil 5 tahun selama 2008-2012, sampelnya adalah 10 bank syariah. Metode menggunakan uji normalitas, uji f, uji  $R^2$ , uji t dan spss. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dpk, nisbah bagi hasil, LAR, dan CAR berpengaruh pada pembiayaan musyarakah, sedangkan modal sendiri tidak mempengaruhi pembiayaan musyarakah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh I Gede Oggy Pratama Putra dan Surya Dewi Rustariyuni (2015). Mengenai Pengaruh DPK, BI Rate, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada BPR di Provinsi Bali 2009-2014. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK), BI Rate dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014 dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menyatakan bahwa DPK, BI Rate dan NPL mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di provinsi bali tahun 2009-2014, sedangkan secara parsial diperoleh bahwa DPK, BI Rate dan NPL mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wuri Arianti Novi Pratami (2011) mengenai Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hub DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap besarnya pembiayaan perbankan syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan bank muamalat Indonesia 200-2011 dengan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi

berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ferial Nurbaya (2013). Mengenai Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 – Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). Penelitian ini mencoba mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel, CAR (X1), ROA (X2), FDR (X3), dan DPK (X4) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y). populasi penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, sampel yang diambil adalah laporan keuangan triwulan selama 9 periode yaitu 2001-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain. Secara parsial CAR, ROA, dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Relevansi dari 5 penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah sebagai berikut :

Pada penelitian Firdausiyah terdapat perbedaan variabel yang diteliti, yaitu jika pada penelitian Firdausiyah menggunakan variabel independen pendapatan perkapita, dan suku bunga kredit modal kerja maka dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut. Selain itu juga variabel dependen pada penelitian Firdausiyah menggunakan variabel permintaan pembiayaan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan modal kerja syariah. Objek penelitian pada penelitian Nurul yaitu 5 bank syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan 10 bank syariah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul terdapat beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian ini, yaitu dalam penelitian Nurul menggunakan variabel modal sendiri, LAR, dan CAR maka dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut. Selain itu variabel dependen yang digunakan dalam penelitian Nurul yaitu pembiayaan musyarakah maka dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan modal kerja syariah, dan juga periode tahun yang digunakan dalam penelitian Nurul adalah selama 5 tahun pada 2008-2012 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 8 tahun pada 2010-2017.

Pada penelitian yang dilakukan oleh I Gede dan Surya terdapat perbedaan variabel yaitu pada penelitian I Gede dan Surya menggunakan variabel independen BI Rate, dan NPL sedangkan pada penelitian ini tidak

memakai variabel tersebut. Objek penelitian dalam penelitian I Gede dan Surya yaitu pada BPR di provinsi bali sedangkan pada penelitian ini menggunakan 10 bank syariah. Periode tahun yang digunakan dalam penelitian I Gede dan Surya selama 6 tahun pada 2009-2014 sedangkan pada penelitian ini menggunakan 8 tahun pada 2010-2017.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wuri terdapat perbedaan yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian Wuri menggunakan variabel NPF, dan ROA sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut. Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian Wuri perbankan syariah studi kasus Bank Muamalat . Sampel yang digunakan dalam penelitian Wuri adalah laporan keuangan triwulan bank muamalat Indonesia 200-2011 dengan metode purposive sampling.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferial Nurbaya terdapat perbedaan yang diteliti yaitu jika penelitian Ferial menggunakan variabel independen CAR, dan ROA sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut, selain itu variabel dependen yang digunakan pada penelitian Ferial yaitu pembiayaan murabahah sedangkan dalam penelitian ini pembiayaan modal kerja syariah. populasi penelitian Ferial adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, sampel yang diambil adalah laporan keuangan triwulan selama 9 periode yaitu 2001-2009.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Bank Syariah

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Karim, 2008).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui dua prinsip yaitu prinsip *wadiah yad dhamanah* dan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Kemudian dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar, penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan tiga pola yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip *ujroh*. Atas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, bank syariah akan memperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan, dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa) (Wiroso, 2005).

## 2. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok dari suatu bank, yaitu dalam pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaanya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan juga dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang ditujukan bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, pengerjaan proyek maupun untuk kebutuhan modal kerja lainnya.

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja syariah dilakukan atas dasar hasil analisa terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan keseluruhan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan antara lain yaitu : jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan dan karakter transaksi dalam sector usaha yang akan dibiayai. Adapun akad-akad yang dapat

digunakan dalam proyek ini antara lain : Mudharabah, Istishna, Salam, Murabaha, dan Ijarah. (Adiwarman A. Karim, 2010)

Jenis kontrak dalam pembiayaan syariah untuk modal kerja yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pembiayaan Syariah Dengan Skema Jual Beli

Pembiayaan syariah untuk modal kerja dengan skema murabahah atau jual beli. Dalam skema pembiayaan murabahah ini, pihak bank syariah akan membiayai pembelian barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah. Pembiayaan akan diberikan sebesar harga pokok dan ditambah dengan margin keuntungan untuk bank syariah yang mana sudah disetujui oleh pihak bank dan nasabah. Tingkat atau besaran keuntungan bank sudah ditentukan di awal perjanjian atau akad dan keuntungan ini menjadi bagian dari harga atas barang yang dijual. Misalnya, seorang pebisnis yang bergerak di bidang jual beli baju online, mendapatkan pesanan baju senilai 100 juta, namun sang pengusaha hanya memiliki modal sebesar 50 juta saja. Maka kemudian pengusaha tersebut bisa mengajukan pembiayaan modal kerja sebesar 50 juta sebagai tambahan modal. Perlu diketahui bahwa, jika bank menilai kebutuhan pengusaha cenderung ke kebutuhan material maka bank syariah akan memberikan pembiayaan modal kerja dengan skema jual beli. Dengan menetapkan margin keuntungan di awal perjanjian, misalnya sebesar 10 juta, maka total pembiayaan adalah senilai 60 juta.



## 2. Pembiayaan Syariah Skema Kerja Sama

Pembiayaan syariah adalah skema kemitraan bagi hasil atau mudharabah. Pembiayaan syariah pada skema ini didasarkan pada kemauan kedua pihak (bank dan nasabah) untuk melakukan kerja sama dalam upaya untuk menaikkan nilai aset mereka. Dalam kontrak perjanjian tertulis pula skema pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, seorang kontraktor yang mendapatkan kontrak pembangunan infrastruktur sebesar dengan total modal yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak tersebut adalah Rp 2 miliar. Namun, pengusaha jasa konstruksi ini hanya mempunyai modal sebesar Rp1.5 miliar, masih kurang Rp500 juta. Dalam hal ini, jika pihak kontraktor lebih memerlukan kas, maka bank syariah akan menyediakan pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil. Dalam skema ini, pihak bank dan kontraktor tersebut bekerja sama dan membentuk kesepakatan nisbah bagi hasil.

Sistem pembiayaan modal kerja bank syariah di Indonesia adalah sebagai berikut (Mohammad Wadirman, 2017) :

### 1. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan likuiditas ini memiliki kegunaan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat ketidaksesuaian antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Kebutuhan pembiayaan tersebut muncul pada suatu perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi jumlah ataupun jangka waktunya melebihi

kapasitas modal kerja yang dimiliki. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank syariah adalah menyediakan fasilitas dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang biasa disebut *compensating balance*. Dengan fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro, dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut.

## 2. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini muncul pada perusahaan yang biasanya menjual barangnya secara kredit, tetapi jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimiliki.

## 3. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil adalah bentuk perolehan kembalinya dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa system bagi hasil merupakan salah satu praktek perbankan syariah (Adiwarman Karim, 199;2004). Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NUC (*Natural Uncertainty Contract*), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat margin keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai.

Nisbah bagi hasil adalah pendapatan bank yang paling utama. Pada perbankan syariah sering disebut yaitu *profit & Loss Sharing* yang merupakan pembagian antara untung ataupun rugi dari pendapatan yang diterima atau hasil usaha yang telah dilakukan. Bagi hasil dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan (Muhammad, 2002:101). Adanya tingkat bagi hasil dapat diyakini menggerakkan pembiayaan dalam mengembangkan sektor riil. Hal ini dikarenakan pembiayaan bersifat produktif yang disalurkan untuk kebutuhan investasi atau modal kerja (Nunung Ghoniyah dan Nurul Wakhidah, 2012).

Prinsip-prinsip syariah harus diterapkan oleh bank berdasarkan pembagian hasil yaitu :

- a. Menetapkan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, keperluan investasi, atau modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut dalam kegiatan usaha bank dengan sistem bagi hasil merupakan hal yang fundamental. Hal inilah yang menjadi dasar perbedaan antara bank konvensional dengan bank

syariah, terutama yang berkaitan dengan praktik riba. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki dewan pengawas syariah, dewan tersebut yang mempunyai tugas mengawasi produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat agar berjalan sesuai prinsip syariah. (Dwi Suwiknyo,2010)

#### **4. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya masyarakat (diluar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy, 2008). Dana-dana yang di himpun dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling besar yang diandalkan oleh bank, mencapai 80% sampai 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2005).

##### **a. Giro (*Demands Deposits*)**

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saatn dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai, atau bilyet giro untuk pemindah bukuan, sedangkan cek atau bilyet giro oleh pemiliknya dapat dilakukan sebagai alat pembayaran (Susilo, 1999). Dalam perbankan syariah, ada 2 giro syariah (Karim, 2004) yaitu yang pertama giro wadiah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Yang kedua giro mudharabah adalah giro yang dijalankan akad mudharabah, dalam hal ini bank syariah sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana).

b. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito merupakan investasi dana yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegang rekening giro atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti kepolisian. Jangka waktu agar mendapatkan pembayaran dari bank atas cek tersebut selama 70 hari sejak tanggal penarikan (Susilo, 1999). Deposito syariah contohnya seperti mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan kepada bank syariah dalam mengelola investasinya baik berkaitan dengan tempat maupun objek investasinya. Selain itu mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberi batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya baik berkaitan dengan tempat maupun objek investasinya (Karim, 2004)

c. Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak menggunakan cek atau bilyet giro atau alat lainnya yang sama dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan menggunakan buku tabungan, kartu ATM, dan debit card. Tabungan yang dibenarkan berdasarkan fatwa dari Dewan

Syariah Nasional yaitu : pertama, tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau Tabungan Wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Kedua, tabungan berdasarkan prinsip mudharabah atau Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah (Karim, 2004).

Dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyaluran dana pada perbankan syariah. Menurut Muhammad Lutfi Qolby (2013), Dana pihak ketiga (DPK) yaitu sumber dana dalam perbankan syariah yang paling utama, sehingga semakin besar jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan syariah dari masyarakat, maka semakin besar juga pembiayaan yang akan diberikan perbankan syariah kepada masyarakat. Perbankan syariah lebih mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk mengalokasikan dalam bentuk pembiayaan, hal tersebut karena dana pihak ketiga (DPK) merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang diberikan perbankan syariah kepada masyarakat.

Menurut Sinungan (1992 : 68) Bank dalam memberikan pembiayaan pada dasarnya adalah proses yang terintegrasi oleh sumber dana bank. Jadi apabila DPK naik, maka bank mempunyai kesempatan dalam menaikkan jumlah pembiayaannya kepada masyarakat agar keuntungan yang diperoleh bertambah. Sebaliknya jika DPK menurun, maka bank juga akan

menurunkan jumlah pembiayaannya kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar tingkat likuiditas bank tetap terjaga.

##### 5. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis adalah rasio likuiditas atau disebut juga *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dalam bank syariah rasio tersebut dikenal dengan istilah *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

Menurut Wibowo (2007) rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima oleh bank. FDR juga menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang, semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasi. Batas aman dari FDR suatu bank sekitar 80%, namun batas toleransi berkisar antara 85% sampai 100% (Ahmad Faisol:2007). Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat, sebaliknya jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan modal kerja pada bank syariah.

Menurut Dewi (2011) Tingginya permintaan pembiayaan masyarakat walaupun kebijakan kreditnya ketat atau rendah (tingkat NPL rendah), maka permintaan terhadap pembiayaan tetap akan tinggi. Permintaan

pembiayaan yang tinggi dapat dilihat dari tingkat FDR Bank Syariah yang juga relatif tinggi bahkan bisa melebihi 100% dibandingkan dengan tingkat LDR pada Bank Konvensional .

Menurut Remi (1999:177) FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Maksimal FDR yang diperkenankan oleh bank Indonesia sebesar 110% .

### **C. Hubungan Antar Variabel**

Hubungan antar variabel menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen

#### **1. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Syariah**

Menurut Adiwarman Karim (2007) nisbah bagi hasil merupakan suatu kegiatan usaha dengan perjanjian adanya sistem pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Dengan demikian, dapat dikatakan sistem bagi hasil merupakan salah satu praktek dalam perbankan syariah. Adanya tingkat sistem bagi hasil dapat diyakini dapat menggerakkan pembiayaan modal kerja syariah, jika nisbah bagi hasil rendah maka tingkat permintaan pembiayaan modal kerja syariah akan menurun dan sebaliknya apabila nisbah bagi hasil tinggi maka tingkat permintaan pembiayaan modal kerja syariah akan naik. Hal ini menggambarkan bahwa nasabah akan melihat proporsi nisbah bagi hasil yang akan didapat sebelum melakukan



permohonan pembiayaan, sehingga jika proporsi nasabah rendah maka keinginan akan permintaan pembiayaan modal kerja syariah akan menurun, dan jika nisbah bagi hasil tinggi maka nasabah akan melakukan permohonan permintaan pembiayaan.

H1 : Nisbah bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan modal kerja syariah.

## **2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Syariah**

Menurut Rinaldy (2008) dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercaya masyarakat (diluar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian dana. Dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan modal kerja syariah, karena dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting dan merupakan ukuran keberhasilan suatu bank dalam kegiatan operasi bank. Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang dicapai oleh perbankan maka pembiayaan modal kerja syariah yang disalurkan akan meningkat, begitupun sebaliknya jika semakin kecil dana pihak ketiga yang dicapai oleh bank maka pembiayaan modal kerja syariah akan menurun.

H2 : Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan modal kerja syariah.

### 3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Syariah

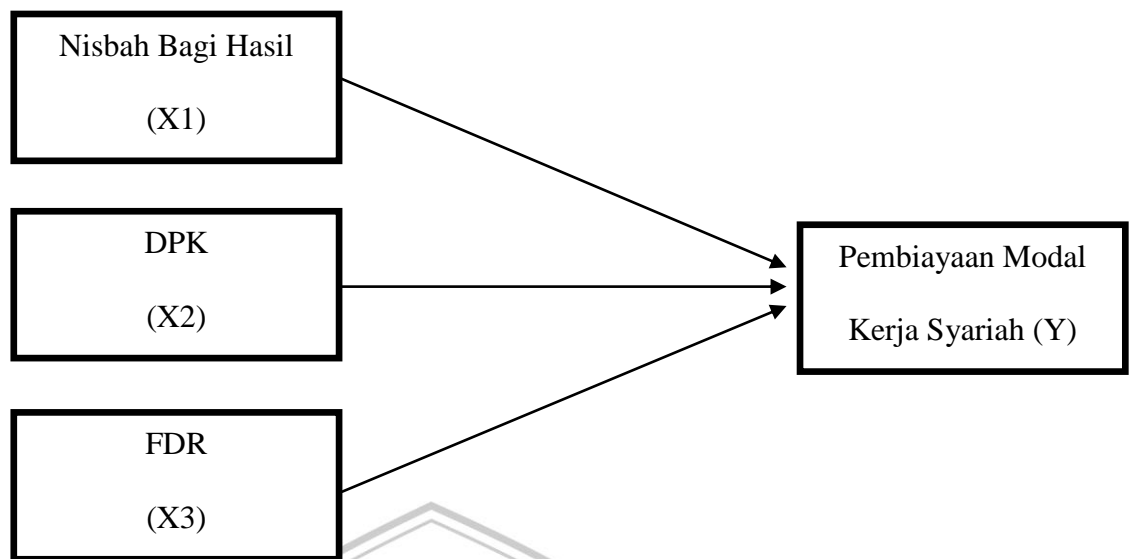
Menurut Ahmad Faisol (2007) FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima oleh bank. FDR juga menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang, semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasi. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan akan meningkat, sebaliknya jika FDR rendah atau mengalami penurunan maka pembiayaan yang disalurkan juga menurun. Sehingga FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan modal kerja pada bank syariah.

H3 : *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan modal kerja syariah.

#### D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Nisbah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Modal Kerja Syariah pada Bank Syariah di Indonesia, Menurut Adiwarmanto Karim (2007) Adanya tingkat sistem bagi hasil dapat diyakini dapat menggerakkan pembiayaan modal kerja syariah, jika nisbah bagi hasil rendah maka tingkat permintaan pembiayaan modal kerja syariah akan menurun dan sebaliknya apabila nisbah bagi hasil tinggi maka tingkat permintaan pembiayaan modal kerja syariah akan naik.

Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Modal Kerja Syariah pada Bank Syariah di Indonesia, Menurut Rinaldy (2008) Dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan modal kerja syariah, karena dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting dan merupakan ukuran keberhasilan suatu bank dalam kegiatan operasi bank. Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang dicapai oleh perbankan maka pembiayaan modal kerja syariah yang disalurkan akan meningkat, begitupun sebaliknya jika semakin kecil dana pihak ketiga yang dicapai oleh bank maka pembiayaan modal kerja syariah akan menurun. *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Modal Kerja Syariah pada Bank Syariah di Indonesia, Menurut Ahmad Faisol (2007) Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasi. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan akan meningkat, sebaliknya jika FDR rendah atau mengalami penurunan maka pembiayaan yang disalurkan juga menurun. Sehingga FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan modal kerja pada bank syariah. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis:



*Sumber : diolah dari berbagai sumber*

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Syariah pada Bank Syariah di Indonesia**

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Diduga Nisbah bagi hasil, DPK, dan FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan Modal Kerja Syariah pada Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2017.